

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara tata kelola perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komposisi kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pajak seperti besarnya pajak yang dibayarkan untuk kemudian nantinya memutuskan melakukan penghindaran pajak daripada mempertimbangkan faktor non pajak seperti besarnya kepemilikan saham institusi. Semakin besar pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
- b. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih mempertimbangkan keberadaan dan penerapan sanksi administrasi maupun pidana perpajakan untuk kemudian memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak daripada melihat banyak atau sedikitnya jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan.

- c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan lebih ditentukan oleh moral-etika pajak yang dimiliki oleh perusahaan atau dalam hal ini pihak manajemen perusahaan dan mereka tidak mempertimbangkan hasil audit laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi moral-etika pajak, maka akan semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.
- d. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip konservatisme bukanlah faktor yang mendorong perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran pajak. Prinsip ini digunakan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pemasukan pajaknya dan untuk mempersempit ruang bagi perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran atau bahkan pelanggaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi arahan bagi penelitian yang akan datang. Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan rumus variabel penghindaran pajak (*tax shelter*) yang memiliki banyak kriteria penggunaan yang harus terpenuhi. Salah satu kriterianya yaitu perusahaan sampel harus memiliki biaya penelitian dan pengembangan selama lima tahun berturut – turut. Hal ini membuat

sampel penelitian menjadi terbatas karena perusahaan manufaktur yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan selama lima tahun berturut – turut hanya sebanyak 10 perusahaan saja. Sehingga jumlah sampel penelitian menjadi sedikit.

- b. Penelitian ini hanya mengukur tata kelola perusahaan dengan menggunakan tiga alat ukur, yaitu komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi dan kualitas audit. Masih terdapat beberapa mekanisme tata kelola perusahaan lain yang belum digunakan sebagai alat pengukuran seperti ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan kepemilikan manajerial.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan bidang keilmuan akuntansi. Masukan atau saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan rumus perhitungan penghindaran pajak yang lebih sederhana namun tetap dapat menggambarkan fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia, seperti misalnya menggunakan *Cash ETR* sebagai alat pengukuran, sehingga tidak menyebabkan sampel yang digunakan menjadi sedikit. Selain itu, diharapkan sampel yang digunakan dapat diperluas tidak hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja sehingga hasil penelitian ini semakin baik dan akurat.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan mekanisme *corporate governance* yang lain seperti keberadaan komite audit, kepemilikan saham manajerial dan dewan komisaris atau menggunakan variabel pengukuran tata kelola perusahaan yang berbeda yang mungkin lebih berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak seperti menggunakan variabel *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).